

## BAB II

### ISLANDIA DAN PERJANJIAN SCHENGEN

#### 2.1 Sejarah Perkembangan Perjanjian Schengen

Perjanjian Schengen merupakan sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh lima negara anggota *European Community* yaitu Jerman, Perancis, Belanda, Luksemburg, dan Belgia pada tanggal 14 juni 1985 tepatnya di atas kapal Princess Marie Astrid di kota Schengen, Luksemburg. Tujuan dibuatnya perjanjian Schengen ini adalah untuk memudahkan warga Eropa untuk melakukan perjalanan ke seluruh negara-negara Eropa yang termasuk dalam negara anggota Schengen untuk bekerja atau hidup di area tanpa batasan internal. Butuh waktu 10 tahun sebelum Schengen benar-benar diterapkan. Selama beberapa waktu itu, sebuah konvensi yang melibatkan beberapa peraturan tentang bagaimana menerapkan perjanjian Schengen yang di tandatangani pada tahun 1990.<sup>26</sup>

Perjanjian Schengen memungkinkan kebebasan pergerakan modal, barang, jasa, dan orang melalui perbatasan antarnegara yang berpartisipasi dalam Schengen. Hal ini dimungkinkan karena ditiadakannya kontrol dan pemeriksaan dokumen di perbatasan antarnegara yang cukup rumit, terlebih setelah Konvensi Schengen, yang merupakan instrumen pelaksana Perjanjian Schengen, ditandatangani pada tahun 1990. Mudahnya arus masuk modal, barang, jasa, dan orang antarnegara tersebut kemudian turut menarik perhatian negara-negara Eropa

---

<sup>26</sup> Eggers, *Op.Cit.*, hal.6

lainnya. Secara berangsur-angsur, negara-negara Eropa lainnya ikut menandatangani dan mengimplementasikan isi perjanjian Schengen. Pada tahun 1999, Perjanjian Schengen ditetapkan sebagai bagian dari kerangka kerja Uni Eropa melalui Perjanjian Amsterdam. Dengan masuknya Perjanjian Schengen sebagai salah satu bagian dari Uni Eropa, maka setiap warga negara Uni Eropa telah bebas berpergian, bekerja, dan tinggal di negara anggota Uni Eropa manapun tanpa suatu formalitas yang khusus.<sup>27</sup>

Kerja sama Schengen telah meningkatkan kebebasan bergerak dengan memungkinkan warga negara Uni Eropa melintasi perbatasan internal perbatasan antarnegara anggota Schengen tanpa harus menjalani pengecekan di perbatasan tersebut. Area Schengen yang tanpa batas ini telah menjamin kebebasan bergerak kepada lebih dari 400 juta warga negara Uni Eropa serta warga negara non-Uni Eropa yang memegang visa Schengen, wisatawan, pebisnis dan juga orang-orang lain yang secara legal berada di dalam wilayah Uni Eropa.<sup>28</sup>

Sekarang terdapat 26 negara yang termasuk dalam perjanjian Schengen, anggota pertama yaitu Belgia, Perancis, Jerman, Luxemburg, dan Belanda. 21 negara lainnya adalah Rep.Ceko, Denmark, Estonia, Yunani, Spanyol, Italia, Latvia, Lithuania, Hungaria, Malta, Austria, Polandia, Portugal, Slovenia,

---

<sup>27</sup> Pradono Budi Saputro, *Relevansi Perjanjian Schengen Pasca Serangan Teror ISIS Di Eropa Periode 2015-2016*, International & Diplomacy, Volume.2, No.2 (Januari-Juni 2017), Jakarta: Universitas Satya Negara Indonesia, hal.187, diakses dalam <http://isip.usni.ac.id/jurnal/3%20Pradono%20Budi%20Saputro.pdf> (2/10/2018, 21.35 WIB)

<sup>28</sup> Saputro, *Op.Cit.*

Slovakia, Finlandia, Swedia, dan negara non Uni Eropa yaitu Islandia, Norwegia, Liechtenstein, dan Swiss.<sup>29</sup>

**Gambar 2.1 Negara Kawasan Schengen**



**Sumber: BBC News**

Dari gambar diatas, terdapat 2 negara Uni Eropa yang *non full Schengen member*, yaitu Inggris dan Irlandia. Kedua negara tersebut tidak berpartisipasi dalam pembukaan perbatasan bagi kebebasan bergerak orang, namun hanya berpartisipasi dalam usaha mencegah tindak kriminalitas yang diatur dalam

<sup>29</sup> *Schengen: Controversial EU free movement deal explained*, BBC News, diakses dalam <https://www.bbc.com/news/world-europe-13194723> (2/10/2018, 21.35 WIB)

konvensi Schengen melalui *Schengen Information System* (SIS). Alasan Inggris dan Irlandia untuk tidak membuka perbatasannya merupakan karena alasan politik. Kedua negara itu merupakan negara kepulauan yang terpisah dari daratan Eropa dan juga menganggap bahwa pengawasan di perbatasan negaranya merupakan hal yang sangat penting bagi pertahanan nasional mereka. Dengan dibukanya perbatasan, dikhawatirkan akan mengancam keamanan negara. Selain itu, Inggris dan Irlandia juga telah tergabung dalam *Common Travel* yang juga menjamin kebebasan bergerak bagi warga di wilayah negara anggotanya sehingga kedua negara tersebut tidak berpartisipasi dalam Schengen dalam hal pembukaan perbatasan.<sup>30</sup>

Isu tentang pergerakan bebas bagi masyarakat telah menjadi bahan diskusi di *European Economic Community* (EEC) sebelum perjanjian Schengen tahun 1985 antara Belgia, Perancis, Jerman, Luksemburg dan Belanda. Perjanjian ini adalah perjanjian dari masing-masing pemerintah negara-negara tadi yang independen dari diskusi atau perjanjian EEC yang lebih luas. Pada bulan Juni 1990, pihak-pihak yang terlibat dari perjanjian tersebut menandatangani sebuah konvensi yang mengimplementasikan perjanjian itu lagi di desa Schengen. Tujuan awalnya yaitu menghapuskan semua masalah pengecekan pada individu dan barang di perbatasan di negara-negara terkait.<sup>31</sup>

Selain kebebasan orang bepergian di daerah Schengen, terdapat juga fitur lain dalam perjanjian tersebut seperti polisi mempunyai hak untuk mengejar seorang kriminal yang dicurigai melintasi perbatasan secara ilegal, adanya

---

<sup>30</sup> Rizkiyah, *Op.Cit* hal.4

<sup>31</sup> Charley Coleman, 2016, *Schengen Agreement: A Short History*, hal. 2-3, diakses dalam <http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/LLN-2016-0013/LLN-2016-0013.pdf>

*Schengen Information System* (SIS) yang memungkinkan kantor polisi dan konsulat untuk mengakses basis data dan bertukar informasi serta daftar-daftar orang-orang yang dicari atau benda curian. Melalui Schengen juga merupakan upaya bersama negara-negara anggotanya untuk memerangi kejahatan termasuk narkoba.<sup>32</sup>

Bagi Warga negara non Uni Eropa dapat masuk dan berpergian dengan bebas dalam area Schengen paling lama tiga bulan jika memiliki dokumen perjalanan yang valid, memiliki visa Schengen untuk transit atau tinggal sementara, mampu menjelaskan alasan perjalanannya, memiliki cukup biaya untuk tinggal dan perjalanan pulang ke negaranya, dan tidak dianggap sebagai ancaman bagi ketertiban umum atau keamanan nasional di salah satu negara anggota Schengen. Jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, seorang warga negara non Uni Eropa tidak akan dapat menikmati kebebasan bergerak di area Schengen seperti warga negara Uni Eropa.

Negara-negara nordik telah menjadi bagian dari perjanjian yang serupa dengan Schengen sebelum perjanjian tersebut dibuat yaitu *Nordic Passport Union*. Norwegia menandatangani perjanjian *Nordic Passport Union* pada tanggal 12 Juli 1957 bersama dengan Denmark, Finlandia, dan Swedia. Di susul Islandia pada 24 September 1965. Perjanjian ini juga menghapuskan kontrol cek dan pemeriksaan di perbatasan internal antara negara-negara anggotanya.<sup>33</sup> Setelah Denmark, Swedia, dan Finlandia bergabung dalam Schengen, Islandia dan

---

<sup>32</sup> *Schengen: Controversial EU free movement deal explained, Loc.Cit*

<sup>33</sup> Coleman, *Loc.Cit.*, hal.6

Norwegia kemudian mengikuti langkah negara nordik lainnya dengan bergabung dalam perjanjian Schengen demi mempertahankan *Nordic Passport Union*.

Alasan kuat Islandia dan Norwegia ikut bergabung dalam Schengen karena *Nordic Passport Union* tidak bisa berlaku lagi karena aturan dari akuisisi Schengen tidak dapat diselaraskan. Pendapat dari negara-negara nordik yaitu mereka tidak ingin kebebasan bepergian tanpa visa diantara negara-negara mereka diselesaikan dengan cara seperti ini, selain itu sudah lama terjalin kerjasama yang signifikan antar kepolisian dan bea cukai, bantuan hukum dan bidang lainnya. Yang menjadi bahaya jika Denmark menjadi anggota komunitas Schengen akan membuat *Nordic Passport Union* terpecah apabila negara nordik lainnya tidak mengikuti langkah Denmark. Karena alasan ini, para perdana menteri nordik berdiskusi pada sebuah pertemuan di Reykjavik, Islandia pada tanggal 27 Februari 1995 bahwa mereka melayani kepentingan terbaik bagi negara anggotanya bahwa negara-negara nordik memiliki sikap positif yang sama terhadap partisipasi dalam komunitas Schengen. Karena itu, negara-negara nordik yang termasuk dalam Uni Eropa mengajukan reservasi dalam aplikasi keanggotaannya untuk solusi bagi posisi Islandia dan Norwegia. Islandia dan Norwegia kemudian diberikan status *associate* karena kedua negara tersebut bukan negara Uni Eropa.

Meskipun Islandia dan Norwegia tidak memiliki hak suara di komite eksekutif Schengen, mereka dapat mengekspresikan pendapat dan merumuskan proposal. Untuk memperpanjang dan memperluas asosiasi ini, perjanjian dengan Islandia dan Norwegia dalam implementasi, penerapan dan pengembangan

akuisisi Schengen berdasarkan keputusan dewan Uni Eropa 1999/439/EC pada 17 Mei 1999, ditandatangani oleh Islandia dan Norwegia pada 18 Mei 1999.<sup>34</sup>

Negara-negara non-Uni Eropa yang ingin ikut serta dalam perjanjian Schengen harus mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa tentang masalah perpindahan orang secara bebas. Untuk anggota negara non-Uni Eropa, partisipasi dalam area Schengen melibatkan tiga hal yaitu:

- a. Berada dalam area tanpa pemeriksaan di perbatasan internal
- b. Menerapkan ketentuan-ketentuan akuisisi Schengen dan semua naskah yang berkaitan dengan Schengen yang relevan dengan ketentuan tersebut
- c. Dilibatkan dalam keputusan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan Schengen yang relevan.<sup>35</sup>

Menurut Jón Baldvin Hannibalsson selaku kepala dari Kementerian Luar Negeri Islandia pada waktu itu, berpendapat bahwa perjalanan bebas visa telah lama menjadi bagian kerjasama negara nordik. Dan ketika ketiga negara Uni Eropa yang menjadi bagian dari *Nordic Passport Union* bergabung ke dalam Schengen, maka selebihnya termasuk Islandia juga harus bergabung untuk mempertahankan pergerakan bebas antara negara-negara nordik. Hannibalsson juga berpendapat bahwa Islandia yang merupakan negara yang minim birokrasi menilai sangat berharga ketika Islandia berintegrasi dengan negara nordik lainnya karena dengan bersama, maka negaranya bisa belajar dari negara nordik lainnya. Islandia dan Norwegia sebenarnya telah dikaitkan dan akan bergabung dalam

---

<sup>34</sup> Coleman, *Loc.Cit.*

<sup>35</sup> *The Schengen Area and Cooperation*, diakses dalam <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:133020> (20/1/2019, 19.35 WIB)

perjanjian Schengen pada tanggal 19 Desember 1996, dan kemudian ditetapkan oleh Komisi dan Dewan Uni Eropa (*Council of the European Union*) pada tanggal 18 Mei 1999 bahwa perjanjian Schengen akan berlaku di kedua negara tersebut pada tahun 2001.<sup>36</sup> Jadi seperti itulah sejarah singkat Islandia bergabung dalam perjanjian Schengen.

Selain Islandia yang bukan negara Uni Eropa, ada juga Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein yang bergabung dalam perjanjian ini. Alasan Norwegia memilih bergabung yaitu hampir sama dengan Islandia yaitu untuk mempertahankan *Nordic Passport Union*. Sementara itu, Swiss memiliki alasan seperti untuk memperkuat keamanan karena Schengen memiliki fungsi seperti kerjasama antar kepolisian. Walaupun Swiss menyetujui masalah penghapusan pemeriksaan paspor, kebijakan pengecekan barang-barang ilegal akan tetap diterapkan oleh Swiss.<sup>37</sup> Sementara Liechtenstein memilih bergabung dalam Schengen karena sudah lama berintegrasi dalam wilayah perdagangan Eropa sejak akses *European Economic Area* (EEA) pada tahun 1995 dan juga merupakan bagian dari *single market*.<sup>38</sup>

Dari semua negara non-Uni Eropa lainnya yang masuk dalam Schengen seperti Norwegia, Liechtenstein, dan Swiss, penulis memilih Islandia karena Islandia merupakan negara yang tidak terlalu luas dan besar dan paling penting yaitu Islandia merupakan negara yang terkenal dengan *Eurosceptism* dan bisa dilihat dari seringnya para partai dan elit politik di Islandia untuk menolak untuk

---

<sup>36</sup> *Official Website of Council of European Union*, diakses dalam <http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=55> (15/10/2018, 21.35 WIB)

<sup>37</sup> Imogen Foulkes, *Switzerland Open Its Borders*, BBC News, diakses dalam <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7778022.stm> (20/1/2019, 20.23 WIB)

<sup>38</sup> European Commission, *Liechtenstein is Now Part of the Schengen Area*, diakses dalam [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-11-1566\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1566_en.htm) (20/1/2019, 20.29 WIB)



bergabung dalam Uni Eropa. Namun sisi menariknya yaitu, Islandia telah menandatangani dan ikut serta dalam penerapan perjanjian-perjanjian yang termasuk dalam kerangka kerja Uni Eropa. Sebut saja perjanjian *European Free Trade Association* (EFTA) pada tahun 1970, kemudian perjanjian *European Economic Area* (EEA) pada tahun 1992, dan juga perjanjian Schengen pada tahun 2001.

## **2.2 Islandia Dalam Perjanjian Schengen**

### **2.2.1 Efek Negatif Schengen**

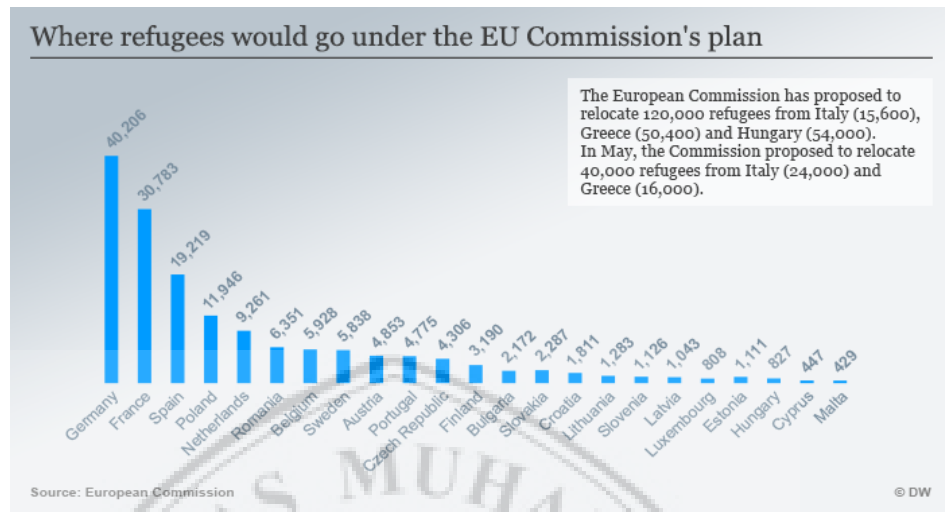
Dalam dua puluh tahun terakhir, area Schengen telah memperlihatkan ketakutan dan persepsi ancaman imigrasi yang cukup luas. Kebijakan penghapusan pemeriksaan di pos-pos perbatasan internal dan kebebasan bergerak di wilayah Schengen telah menjadi celah bagi para imigran ilegal untuk masuk ke wilayah tersebut. Berkembangnya proses imigrasi di Eropa telah menjadi perbincangan serius. Secara khusus telah dikatakan bahwa migrasi merupakan ancaman keamanan multi-dimensional yang sudah menjadi hal yang penting sejak tahun 1990-an, dan bahkan setelah terjadinya peristiwa 9/11. Persepsi ancaman terkait imigrasi secara khusus melekat pada Schengen, yang selama bertahun-tahun menjadi prakarsa yang berorientasi pada keamanan dan juga meningkatnya angka para imigran ilegal.<sup>39</sup>

Berikut adalah grafik dari jumlah imigran yang masuk dan terjadi di negara-negara Schengen dan juga proses imigrasi dan emigrasi di Islandia:

---

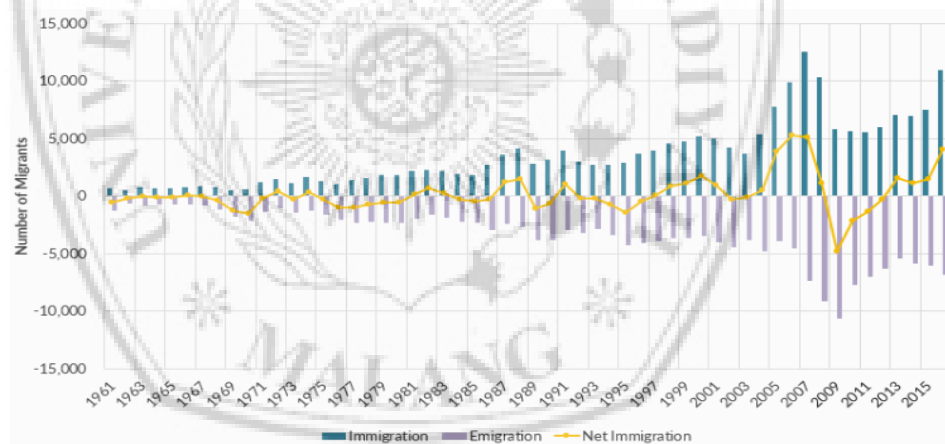
<sup>39</sup> Alkoper & Blanc, *Op.Cit.*, hal.18-19

## Grafik 2.1 Jumlah Pengungsi Yang Masuk ke Eropa



Sumber: European Commission

## Grafik 2.2 Imigrasi dan Emigrasi di Islandia



Sumber: Migration Policy

Di era modern ini, beberapa aksi teror sering terjadi yang dilakukan oleh kelompok yang bernama *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di sejumlah negara Eropa sepanjang tahun 2015-2016 dan kemudian membuktikan bahwa sistem Schengen ini masih memiliki kekurangan. Sepanjang tahun 2015-2016 itu terjadi setidaknya empat aksi terorisme di Eropa yang melibatkan ISIS. Keempat aksi

teror itu adalah serangan Paris pada 13 November 2015, serangan bom bunuh diri Brussel pada 22 Maret 2016, serangan truk di Nice pada 14 Juli 2016, dan serangan pasar natal di Berlin 19 Desember 2016. Dari keempat aksis teror tersebut, ada 271 korban tewas dan lebih dari 1.000 korban terluka, baik yang berkewarganegaraan Eropa maupun yang bukan. Kerapuhan sistem Schengen terlihat jelas dengan adanya sekelompok pemuda militan ISIS yang memanfaatkan kebebasan bergerak dalam area Schengen untuk kepentingan mereka. Serangan Paris, direncanakan di Suriah dan direncanakan oleh sebuah sel teroris yang berbasis di Belgia.<sup>40</sup>

### **2.2.2 Keuntungan Schengen**

Selain dari beberapa fungsi dan keuntungan dari perjanjian Schengen seperti kemudahan bergerak bagi barang, modal, jasa, dan orang. Perjanjian ini juga memuat sebuah konvensi yaitu *Schengen Information System* (SIS).

#### **a. Schengen Information System (SIS)**

*Schengen Information System* merupakan bagian dari konvensi Schengen yang ditandatangani di tahun 1990 namun baru mulai diberlakukan di tahun 1995. SIS ini adalah sistem informasi berskala besar yang sangat efisien yang mendukung kontrol luar perbatasan dan kerja sama dalam penegakan hukum di negara-negara Schengen. SIS ini memperbolehkan otoritas yang kompeten, seperti polisi dan penjaga perbatasan dapat masuk dan konsultasi peringatan pada kategori tertentu dari daftar orang atau barang yang hilang atau dicari. Peringatan SIS tidak hanya berisi tentang informasi tentang orang atau objek tertentu, tapi juga berisi tentang

---

<sup>40</sup> Saputro, *Op.Cit.*, hal.4

intruksi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan ketika orang atau objek tersebut ditemukan. Biro khusus sirene nasional berfungsi sebagai titik kontak tunggal untuk pertukaran informasi tambahan dan kordinasi kegiatan yang terkait dengan peringatan dari SIS. SIS ini telah beroperasi di 30 negara Eropa, termasuk 26 negara anggota Uni Eropa, dan 4 negara non Uni Eropa yang termasuk dalam Schengen yaitu Swiss, Norwegia, Liechtenstein, dan Islandia.<sup>41</sup>

Tujuan Utama dari SIS ini adalah untuk membantu menjaga keamanan internal di negara-negara Schengen dengan tidak adanya pemeriksaan perbatasan internal. Ruang lingkup dari SIS ini didefinisikan dalam tiga instrumen hukum yaitu:

- Regulasi (EC) No. 1987/2006 (Kerjasama kontrol perbatasan), SIS memperbolehkan penjaga perbatasan dan penerbit visa dan otoritas migrasi untuk masuk dan berkonsultasi tentang peringatan terhadap warga negara untuk tujuan menolak masuk atau tinggal di wilayah Schengen.
- Keputusan Dewan 2007/533/JHA (Kerjasama penegakan hukum), SIS mendukung polisi dan kerjasama peradilan dengan mengizinkan pihak yang berwenang untuk membuat dan berkonsultasi tentang peringatan orang atau objek yang hilang atau dicari dengan pelanggaran pidana.
- Regulasi (EC No. 1986/2006 (Kerjasama pendaftaran kendaraan), Layanan pendaftaran kendaraan dapat dikonsultasikan dengan melalui SIS untuk memeriksa status legal kendaraan yang diajukan kepada mereka

---

<sup>41</sup> *Schengen Information System*, diakses dalam [https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system\\_en](https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system_en) (29/11/2018, 22.353 WIB)

untuk pendaftaran tersebut. Mereka hanya memiliki akses ke peringatan SIS pada kendaraan, sertifikat pendaftaran dan plat nomor kendaraan.<sup>42</sup>

b. Peningkatan Proses Perdagangan

Ada sekitar 57 juta transportasi melalui perbatasan dengan barang-barang setiap tahun di zona Schengen dan orang-orang yang melintasi perbatasan mencakup 3,5 juta setiap hari. Ini termasuk orang yang bepergian untuk bekerja di suatu tempat dan juga turis. Pengiriman barang melalui perbatasan dengan adanya kontrol dan pengecekan paspor diasumsikan meningkatkan biaya perdagangan karena keterlambatan dan waktu yang dihabiskan dalam mengantri. Peningkatan biaya perdagangan melibatkan pembayaran upah lebih tinggi bagi pengemudi yang akan mengirim barang karena waktu yang dihabiskan ketika pengecekan paspor di perbatasan. Kontrol dan pengecekan di perbatasan mempengaruhi biaya perdagangan dengan barang. Hal tersebut dikarenakan biaya tambahan akibat penundaan transportasi akan berkisar antara €1.7 to € 7.5 miliar setiap tahunnya. Maka dari itu, dengan adanya perjanjian Schengen yang memuat penghapusan dan pengecekan kontrol bersama terkait visa dan paspor memiliki dampak positif terhadap perdagangan di Eropa.<sup>43</sup>

Menjadi anggota dari Schengen memiliki dampak bagi perdagangan melalui tiga mekanisme yang berbeda dan semuanya terhubung ke pergerakan orang di perbatasan. Pertama, pengangkut barang tidak perlu lagi menunjukkan paspor ketika melintasi perbatasan sehingga penurunan biaya perdagangan yang awalnya meningkat karena adanya pengecekan ketika melintasi perbatasan. Dengan adanya

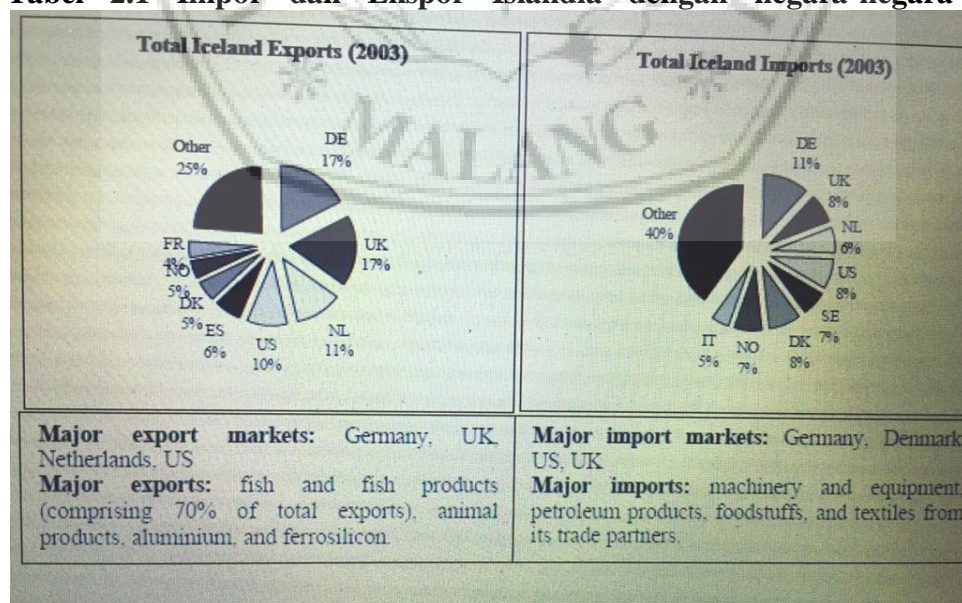
---

<sup>42</sup> *Schengen Information System, Loc.Cit.*

<sup>43</sup> Eggers, *Op.Cit.*, hal.10

Schengen yang maka akan membuat barang yang akan dikirim lebih cepat. Kedua mengacu pada manfaat dari seseorang yang bekerja yang bermigrasi untuk jangka pendek atau panjang. Rasa untuk produk suatu negara tertentu juga dapat meningkatkan impor untuk negara lainnya. Selanjutnya, memiliki pengetahuan dan jaringan sosial dapat membangun hubungan perdagangan yang baru antara negara Schengen. Membangun hubungan antar negara melalui informasi dan pengetahuan juga cenderung memiliki dampak positif pada proses impor dan ekspor. Sebagai kesimpulan, nilai impor meningkat dengan 3,6 persen jika negara tersebut menerapkan perjanjian Schengen. Schengen juga memiliki dampak positif dengan 16,4 persen pada nilai impor dan ekspor untuk makanan dan hewan hidup yang dihasilkan karena tidak adanya lagi pemeriksaan dan pengecekan paspor di perbatasan.<sup>44</sup> Sebagai berikut akan dijelaskan proses impor dan ekspor yang terjadi di Islandia:

**Tabel 2.1 Impor dan Ekspor Islandia dengan negara-negara Eropa**



**Sumber: European Parliament Directorate-General External Policies**

<sup>44</sup> Eggers, *Op.Cit.*, hal.12

Dalam tabel diatas bisa dijelaskan bahwa mitra dagang penting Islandia adalah negara-negara Uni Eropa. Pada tahun 2003, 72,5% dari kegiatan ekspor Islandia menuju ke negara Uni Eropa dan 57,5% impor juga berasal dari negara-negara Uni Eropa juga. Dalam tabel tersebut juga bisa dilihat bahwa kegiatan ekspor Islandia kebanyakan melalui produk yang paling mencolok di Islandia yaitu produk perikanan. Sebaliknya, kegiatan ekspor Islandia yaitu mesin dan peralatan, produk minyak bumi, bahan makanan, dan tekstil.<sup>45</sup>

### 2.3 Pandangan Islandia Terhadap Visa Schengen

Sebelum bergabung dalam perjanjian Schengen, terdapat beberapa pandangan dari beberapa unit pemerintahan Islandia seperti pandangan dari Perdana Menteri, Menteri Peradilan, dan juga Menteri Luar Negeri dimana ketiga unit pemerintahan tersebut yang memiliki tanggung jawab dalam proses menuju keanggotaan Schengen.

Dalam melihat situasi Islandia yang akan bergabung dalam perjanjian Schengen, Þorsteinn Pálsson selaku Menteri Peradilan di Islandia mengeluarkan pernyataan di parlemen nasional Islandia setelah bertemu dengan komite eksekutif Schengen pada tahun 1996 yaitu:

*“by entering into cooperation with the European Union in the fields covered by schengen convention, Iceland was entering into new teritory in cooperation with the European Union. undeniably*

---

<sup>45</sup> Jennifer Allen, 2005, *Information Note on The Political and Economic Situation of Iceland and EU-Iceland Relations*, hal. 11, diakses dalam [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004\\_2009/documents/fd/deea20050608\\_09/deea20050608\\_09en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/deea20050608_09/deea20050608_09en.pdf) (16/10/2018, 17.52 WIB)

*it was not an easy matter to establish channels for such cooperation”<sup>46</sup>*

Dalam pernyataan Pálsson tersebut, dapat diketahui bahwa dengan bergabungnya Islandia dalam perjanjian Schengen, Islandia akan memasuki kerjasama teritorial baru dengan negara-negara Uni Eropa. Maka dari itu, perlu ditinjau bagaimana peran dari Menteri Peradilan terkait keamanan dan perimigrasian yang kemudian akan dilaporkan ke Perdana Menteri dan Presiden.

Kemudian Pada saat pertemuan di parlemen tahun 1999, Menteri Luar Negeri juga berpendapat mengenai Schengen yaitu:

*“No conclusion could be drawn regarding a change in position towards the European Union on the part of Icelandic government from the fact that it was taking part in the schengen scheme. This participation was based on spesific political aims: to preserve the nordic passport union and at the same time to strenghten cooperation with the eu member states in the sphere of policing. The schengen convention gave iceland a unique opportunity to exert an influence on European Union policy in the areas involved. In fact, the opportunities involved were unique in relations between european union and a non eu state. In a schengen scheme, contrary to the situation under the EEA agreement, iceland had an influence on the substance of decisions at all levels of the process, both within the commision and the council of ministers. Quite apart from whatever views people might have on wheter or not iceland should participate in schengen. They should welcome the fact that it had gained influence in this forum”<sup>47</sup>*

Dalam pernyataan tersebut, bisa disimpulkan Menteri Luar Negeri menyambut baik Islandia bergabung dalam perjanjian Schengen karena Islandia

---

<sup>46</sup> Baldur Thorhallsson, 2004, *Iceland and European Integration: On The Edge*, London, Routledge, diakses dalam [https://books.google.co.id/books?id=h3PsgXEKNrYC&pg=PT62&lpg=PT62&dq=iceland+schengen&source=bl&ots=S9OBzU6RJT&sig=hiizKe2whq8f8i\\_ZmzTYnKZob9s&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiJ94yCyNTeAhXVh3AKHcwCDZw4PBD0ATAHegQIAxAB#v=onepage&q=iceland%20schengen&f=false](https://books.google.co.id/books?id=h3PsgXEKNrYC&pg=PT62&lpg=PT62&dq=iceland+schengen&source=bl&ots=S9OBzU6RJT&sig=hiizKe2whq8f8i_ZmzTYnKZob9s&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiJ94yCyNTeAhXVh3AKHcwCDZw4PBD0ATAHegQIAxAB#v=onepage&q=iceland%20schengen&f=false) (7/12/2018, 03.24 WIB)

<sup>47</sup> Thorhallsson, *Op.Cit.*



akan mempunyai kerjasama baru yang lebih baik dalam hal pergerakan orang, barang, dan modal dengan negara-negara Uni Eropa. Selain itu, Islandia juga akan mempunyai kerjasama dalam hal keamanan dalam kerjasama kepolisian antar negara-negara anggota Schengen yang termasuk dalam *Schengen Information System (SIS)*.

Sebelumnya, pada tahun 1998 dalam pertemuan antara para Perdana Menteri negara nordik di Malmö, Swedia. Perdana Menteri Islandia berpendapat bahwa :

*“The Nordic roadmap co-operation would be the key to Schengen membership”*

Pernyataan dari Perdana Menteri Islandia diatas menjelaskan bahwa kerjasama antar negara nordik yaitu *Nordic Passport Union* merupakan kunci atau alasan agar Islandia bergabung dalam perjanjian Schengen.

Pengurusan keanggotaan dalam perjanjian Schengen dilakukan melalui proses organisasi, dimana sering dilakukan *meeting* di parlemen Islandia mulai dari tahun 1996-1999 yang kemudian menghasilkan Islandia setuju bergabung dalam perjanjian tersebut. Selain itu, keanggotaan dalam perjanjian itu telah memberikan Islandia beberapa hal positif seperti kebebasan bergerak bagi warga negaranya yang melintasi perbatasan, kerjasama antar kepolisian yang lebih luas, meningkatkan proses ekspor dan impor seperti ekspor produk perikanan Islandia yang 72,5% menuju ke negara Uni Eropa dan yang lebih penting yaitu mempertahankan *Nordic Passport Union* yang telah menjadi kerjasama antar negara nordik sejak tahun 1954.